

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Akuntansi

Akuntansi menurut Sumarsan (2018:1), adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Christy (2020:1), definisi akuntansi adalah seni pencatatan, pengelompokan atau pengikhtisaran dan pelaporan yang disajikan dalam laporan keuangan yang menyediakan informasi ekonomi yang berguna untuk pengambilan keputusan.

Nur (2020:10) menyatakan bahwa tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun tujuan akuntansi adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi.
- b. Memproses data menjadi informasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan terkait perencanaan dan pengendalian bisnis.
- c. Melakukan kontrol secara tepat terhadap aset perusahaan.
- d. Efisiensi biaya dan waktu terhadap kinerja keuangan.
- e. Penyajian data keuangan yang sistematis dan akurat dalam periode akuntansi yang tepat.

Berdasarkan pemaparan mengenai pengertian akuntansi, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan proses mengumpulkan,

mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mencatat transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan. Proses tersebut menghasilkan informasi keuangan yang berguna bagi para pemakai laporan (*users*) untuk pengambilan keputusan.

2. Siklus Akuntansi

Menurut Bahri (2016:85) siklus akuntansi merupakan tahapan-tahapan mulai dari terjadinya transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan sehingga siap untuk pencatatan berikutnya. Kegiatan pencatatan akuntansi meliputi:

- a. Pembuatan atau penerimaan bukti transaksi

Gambar 2.1

Bukti Transaksi

6				
7				
8				
9	Bakso Sopoyono	Tanggal		
10	Jalan Sudirman no 1, Jakarta	Pemesanan		
11	Nota No:	Alamat		
12	Banyaknya	Nama Pesanan	Harga Satuan	Jumlah
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27	Penerima,	Jumlah		
28				
29				
30				
31				
32				
33				

Sistem akuntansi terdiri atas rangkaian input (bukti transaksi), proses (buku jurnal, buku besar, neraca saldo), dan output (laporan keuangan)

3. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Di Indonesia terdapat peraturan yang menjadi dasar UMKM, yaitu Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang mendefinisikan UMKM sebagai berikut: Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Menurut Sri Handini, Sukesi dan Hartati Kanty (2019:19), UMKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Sebagian besar masyarakat beranggapan

bahwa UMKM hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Padahal sebenarnya UMKM juga sangat berperan penting dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. UMKM dapat menyerap banyak tenaga kerja Indonesia yang masih menganggur. Selain itu, UMKM telah berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah serta pendapatan negara.

a. Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang kriteria UMKM. Kriteria UMKM menurut Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha. Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada PP No. 7 Tahun 2021 terdiri atas:

- 1.) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2.) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan
- 3.) Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Dan untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada uraian di atas digunakan pula hasil penjualan tahunan yaitu terdiri atas:

- 1.) Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah),
- 2.) Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah), dan
- 3.) Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

Dalam hal pelaku usaha telah melaksanakan kegiatan usaha sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memenuhi kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada uraian di atas. Untuk kepentingan tertentu, selain kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1), kementerian/lembaga dapat menggunakan kriteria omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.

b. Klasifikasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok dalam perkembangan perspektifnya. Menurut Hasanah (2020:18), klasifikasi 4 kelompok tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1.) *Livelihood Activities*, yaitu UMKM yang termasuk dalam kategori ini pada umumnya bertujuan mencari kesempatan kerja untuk mencari nafkah yang lebih dikenal sebagai sektor informal. Biasanya kelompok ini tidak memiliki jiwa kewirausahaan.
- 2.) *Micro Enterprises*, yaitu UMKM yang memiliki jiwa pengrajin dan tidak memiliki jiwa kewirausahaan.
- 3.) *Small Dynamic Enterprises*, yaitu UMKM yang pelakunya memiliki jiwa kewirausahaan. Umumnya pengusaha skala menengah dan besar berasal dari kategori ini. Karena jika dibina dengan baik, sebagai UMKM kategori ini akan masuk ke kategori keempat. Kelompok UMKM ini berjumlah lebih sedikit daripada jumlah UMKM kategori 1 dan 2. Kelompok ini sudah dapat menerima pekerjaan sub-kontrak dan ekspor.
- 4.) *Fast Moving Enterprises*, yaitu UMKM yang pelakunya memiliki jiwa kewirausahaan yang sebenarnya. Dari kelompok ini, akan muncul usaha usaha skala menengah dan besar.

c. Permasalahan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Setiap usaha yang dijalankan pasti memiliki banyak masalah dalam upaya mengembangkan UMKM, terutama hal yang menyangkut manajemen, produksi dan pemasaran, serta pembiayaan. Permasalahan

yang umumnya muncul pada UMKM adalah sulitnya dalam mengakses berbagai sumber-sumber ekonomi. Karena pemerintah tidak memberikan perhatian dan pengawasan yang sama dengan perusahaan swasta dan BUMN. Berikut ini adalah beberapa permasalahan yang biasa ditemukan pada UMKM:

- 1.) Manajemen, umumnya pada kegiatan UMKM khususnya pada usaha mikro dan usaha kecil tidak membedakan persoalan yang ada pada usaha dan persoalan pribadi. Hal yang paling utama terjadi yaitu mengenai kepemilikan, pembiayaan dan keuntungan pada usahanya. Kedua persoalan yang sering tercampur ini menyebabkan fungsi manajemen tidak dilakukan seperti seharusnya baik mengenai perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*activating*), maupun pengawasan (*controlling*). Dengan begitu maka dapat dipastikan bahwa kegiatan usaha tidak berjalan seperti seharusnya.
- 2.) Produksi dan Pemasaran, selain ketidakmampuan dalam mengelola usaha (kemampuan manajemen yang rendah), persoalan yang sering menghambat UMKM untuk berkembang adalah keterbatasan fungsi-fungsi perusahaan, terutama dalam produksi dan pemasaran. Umumnya permasalahan yang dihadapi oleh UMKM dalam hal produksi dan pemasaran adalah:
 - a.) Tidak adanya akses terhadap sumber bahan baku yang berkualitas secara terus-menerus,

- b.) Proses produksi yang sederhana dan tidak memenuhi standar yang menyebabkan mutu yang rendah,
 - c.) Kurangnya perhatian kepada nilai yang mampu memberikan rasa puas kepada pelanggan,
 - d.) Keterbatasan kemampuan mempromosikan produk yang menyebabkan produk tidak dikenal pasar,
 - e.) Kecenderungan menguasai pasar yang terbatas akibat lemahnya kemampuan untuk berkompetisi,
 - f.) UMKM kurang mampu membaca atau melihat peluang pasar karena adanya kecenderungan konsumen mengetahui info yang lebih lengkap tentang produk usaha,
 - g.) Stabilitas dan kontinuitas produk untuk pemenuhan permintaan pasar kurang terjaga.
- 3.) Keuangan, merupakan persoalan yang paling sering dihadapi oleh UMKM yaitu seperti:
- a.) Kurangnya modal kerja untuk menunjang aktivitas usaha,
 - b.) Tidak memiliki pengetahuan mengenai cara-cara mengakses sumber keuangan,
 - c.) Masalah utama dalam UMKM adalah tidak memiliki laporan keuangan sehingga laba dalam usaha sering tidak diperhitungkan
- 4.) Hukum, aspek hukum yang paling mendasar bagi UMKM adalah legalitas badan usaha. Banyak dari UMKM di Indonesia, khususnya usaha mikro dan usaha kecil tidak berbadan hukum. Oleh karena itu,

hal-hal yang berhubungan ke bank atau lembaga keuangan lain serta pihak ketiga sulit dilakukan.

4. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. SAK merupakan format dan prosedur pembuatan laporan keuangan yang menjadi aturan baku penyajian informasi keuangan suatu kegiatan usaha atau perusahaan.

SAK yang berlaku di Indonesia efektif per 1 Januari 2015 secara garis besar akan konvergen dengan *International Financial Reporting Standards (IFRS)* yang berlaku efektif per 1 Januari 2014. DSAK IAI telah berhasil meminimalkan perbedaan antara kedua standar, dari tiga tahun di 1 Januari 2012 menjadi satu tahun di 1 Januari 2015. Ini merupakan suatu bentuk komitmen Indonesia melalui DSAK IAI dalam memainkan perannya selaku satu-satunya anggota G20 di kawasan Asia Tenggara.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) merupakan standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri yang dapat digunakan oleh entitas yang memenuhi definisi entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan sebagaimana yang diatur dalam SAK ETAP dan

karakteristik dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang sudah diperbarui dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. SAK EMKM secara eksplisit mendeskripsikan konsep entitas bisnis sebagai salah satu asumsi dasarnya dan oleh karena itu untuk dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, entitas tersebut harus dapat memisahkan kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan dan hasil usaha entitas tersebut, dan antara suatu usaha/entitas dengan usaha/entitas lainnya.

Apabila dibandingkan dengan SAK lainnya, SAK EMKM merupakan SAK yang dibuat secara sederhana karena mengatur transaksi umum yang dilakukan oleh EMKM dan dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis sehingga EMKM cukup mencatat aset dan liabilitasnya sebesar biaya perolehannya. Penyusunan SAK EMKM bersumber atau mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, pada 18 Mei 2016 Ikatan Akuntan Indonesia telah mengadakan rapat untuk menyusun dan menyetujui “Ekposure Draft Standar Akuntansi Keuangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah” (ED SAK EMKM) kemudian pada tanggal 24 Oktober 2016, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah menyetujui SAK EMKM. Kemudian, SAK EMKM sendiri telah diumumkan berlaku efektif oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) per 1 Januari 2018 dan penerapan dini diperkenankan.

5. Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah

Laporan keuangan adalah suatu laporan yang berisi informasi keuangan yang dapat menggambarkan kondisi keuangan sebuah usaha atau bisnis serta kinerja suatu entitas sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan umumnya terdiri atas, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Menurut Hery (2016:3), laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Seorang akuntan diharapkan mampu untuk mengorganisir seluruh data akuntansi hingga menghasilkan laporan keuangan dan bahkan harus menginterpretasikan serta menganalisis laporan keuangan yang dibuatnya.

Menurut SAK EMKM, laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas pada setiap akhir periode pelaporan serta menggunakan dasar akrual. UMKM terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan

Menurut IAI dalam SAK EMKM (2016:3) tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kapabilitas keuangan, dan laporan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan. Pengguna laporan keuangan tersebut meliputi penyedia sumber daya bagi entitas seperti kreditor maupun investor. Laporan keuangan pula dapat melihat

hasil pertanggungjawaban manajemen atas pemakaian sumber daya. Untuk mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang terdiri atas aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban. Dengan adanya laporan keuangan para pelaku UMKM diharapkan dapat memonitor usaha dan menggunakan informasi laporan keuangan juga sebagai dasar dalam mengambil keputusan bisnis.

a. Laporan Posisi Keuangan

Menurut SAK EMKM (2016:11), laporan posisi keuangan menyajikan informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan. Laporan posisi keuangan entitas dapat mencakup:

- 1) Kas dan setara kas
- 2) Piutang
- 3) Persediaan
- 4) Aset tetap
- 5) Utang usaha
- 6) Utang bank
- 7) Ekuitas

Entitas menyajikan akun dan bagian dari akun dalam laporan posisi keuangan jika penyajian tersebut relevan untuk memahami posisi keuangan entitas. SAK EMKM tidak menentukan format atau urutan terhadap akun-akun yang disajikan.

Tabel 2.1

Laporan Posisi Keuangan SAK EMKM

ENTITAS			
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
31 DESEMBER 20X8 DAN 20X7			
ASET	<u>Catatan</u>	<u>20X8</u>	<u>20X7</u>
Kas dan Setara Kas		xxx	xxx
Kas		xxx	xxx
Giro		xxx	xxx
Deposito		xxx	xxx
Jumlah Kas dan Setara Kas		xxx	xxx
Piutang Usaha		xxx	xxx
Persediaan		xxx	xxx
Beban Dibayar Dimuka		xxx	xxx
Aset Tetap		xxx	xxx
Akumulasi Penyusutan		(xx)	(xx)
JUMLAH ASET			
LIABILITAS			
Utang Usaha		xxx	xxx
Utang Bank		xxx	xxx
JUMLAH LIABILITAS		xxx	xxx
EKUITAS			
Modal		xxx	xxx
Saldo Laba (Defisit)		xxx	xxx
JUMLAH EKUITAS		xxx	xxx
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		xxx	xxx

Sumber: ED SAK EMKM (2016)

b. Laporan Laba Rugi

Menurut SAK EMKM (2016:13), laporan laba rugi merupakan kinerja keuangan entitas dalam suatu periode. Laporan laba rugi dapat mencakup akun-akun sebagai berikut:

- 1.) Pendapatan
- 2.) Beban keuangan
- 3.) Beban pajak

Entitas menyajikan akun dan bagian dari akun dalam laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas. Laporan laba rugi memasukkan semua penghasilan dan juga beban yang diakui dalam suatu periode. SAK EMKM mengatur perlakuan atas dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian retrospektif terhadap periode yang lalu bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan.

Tabel 2.2

Laporan Laba Rugi SAK EMKM

ENTITAS			
LAPORAN LABA RUGI			
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X8 DAN 20X7			
PENDAPATAN	<u>Catatan</u>	<u>20X8</u>	<u>20X7</u>
Pendapatan Usaha		xxx	xxx
Pendapatan Lain-Lain		xxx	xxx
JUMLAH PENDAPATAN		xxx	xxx
BEBAN			
Beban Usaha		xxx	xxx
Beban Lain-Lain		xxx	xxx

JUMLAH BEBAN		xxx	xxx
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		xxx	xxx
Beban Pajak Penghasilan		xxx	xxx
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN		xxx	xxx

Sumber: ED SAK EMKM (2016)

c. Catatan Atas Laporan Keuangan

Menurut SAK EMKM (2016:14), catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Pengukuran yang digunakan dalam SAK EMKM adalah berdasarkan biaya historis sehingga cukup mencatat aset dan liabilitasnya sebesar biaya perolehan.

Catatan atas laporan keuangan memuat:

- 1.) Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM
- 2.) Ikhtisar kebijakan akuntansi
- 3.) Informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

Tabel 2.3

Catatan Atas Laporan Keuangan SAK EMKM

ENTITAS	
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 20X8 DAN 20X7	
1	UMUM Entitas didirikan di Jakarta berdasarkan akta Nomor xx tanggal 1 Januari 20X7 yang dibuat dihadapan Notaris, S.H., notaris di Jakarta dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.xx 2016 tanggal 31 Januari 2016. Entitas bergerak dalam bidang usaha

	<p>manufaktur. Entitas memenuhi kriteria sebagai entitas mikro, kecil, dan menengah sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008. Entitas berdomisili di Jalan xxx, Jakarta Utara.</p>		
2	<p>IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING</p> <p>a. Pernyataan Kepatuhan Laporan keuangan disusun menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM).</p> <p>b. Dasar Penyusunan Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan menggunakan asumsi dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah.</p> <p>c. Piutang Usaha Piutang usaha disajikan sebesar jumlah tagihan.</p> <p>d. Persediaan Biaya persediaan bahan baku meliputi biaya pembelian dan biaya angkut pembelian. Biaya konversi meliputi biaya tenaga kerja langsung dan overhead. Overhead tetap dialokasikan ke biaya konversi berdasarkan kapasitas produksi normal. Overhead variabel dialokasikan pada unit produksi berdasarkan penggunaan aktual fasilitas produksi. Entitas menggunakan rumus biaya persediaan rata-rata.</p> <p>e. Aset Tetap Aset Tetap dicatat sebesar biaya perolehannya jika aset tersebut dimiliki secara hukum oleh entitas. Aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.</p> <p>f. Pengakuan Pendapatan dan Beban Pendapatan penjualan diakui ketika tagihan diterbitkan atau pengiriman dilakukan kepada pelanggan. Beban diakui saat terjadi.</p> <p>g. Pajak Penghasilan Pajak penghasilan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.</p>		
3	KAS	20X8	20X7
	Kas Kecil Jakarta - Rupiah	xxx	xxx
4	GIRO	20X8	20X7
	PT Bank xxx - Rupiah	xxx	xxx
5	DEPOSITO	20X8	20X7
	PT Bank xxx - Rupiah	xxx	xxx

	Suku Bunga Deposito:		
		20X8	20X7
	Rupiah	4,50%	5,00%
6	PIUTANG USAHA		
		20X8	20X7
	Toko A	xxx	xxx
	Toko B	xxx	xxx
	Jumlah	xxx	xxx
7	BEBAN DIBAYAR DIMUKA		
		20X8	20X7
	Sewa	xxx	xxx
	Asuransi	xxx	xxx
	Lisensi dan Perizinan	xxx	xxx
	Jumlah	xxx	xxx
8	UTANG BANK		
	Pada tanggal 4 Maret 20X8, Entitas memperoleh pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) dari PT BANK ABC dengan maksimum kredit Rp. xxx, suku bunga efektif 11% per tahun dengan jatuh tempo berakhir tanggal 19 April 20X8. Pinjaman dijamin dengan persediaan dan sebidang tanah milik entitas.		
9	SALDO LABA		
	Saldo laba merupakan akumulasi selisih penghasilan dan beban, setelah dikurangkan dengan distribusi kepada pemilik.		
10	PENDAPATAN PENJUALAN		
		20X8	20X7
	Penjualan	xxx	xxx
	Retur Penjualan	xxx	xxx
	Jumlah	xxx	xxx
11	BEBAN LAIN-LAIN		
		20X8	20X7
	Bunga Pinjaman	xxx	xxx
	Lain-lain	xxx	xxx
	Jumlah	xxx	xxx
12	BEBAN PAJAK PENGHASILAN		
		20X8	20X7
	Pajak Penghasilan	xxx	xxx

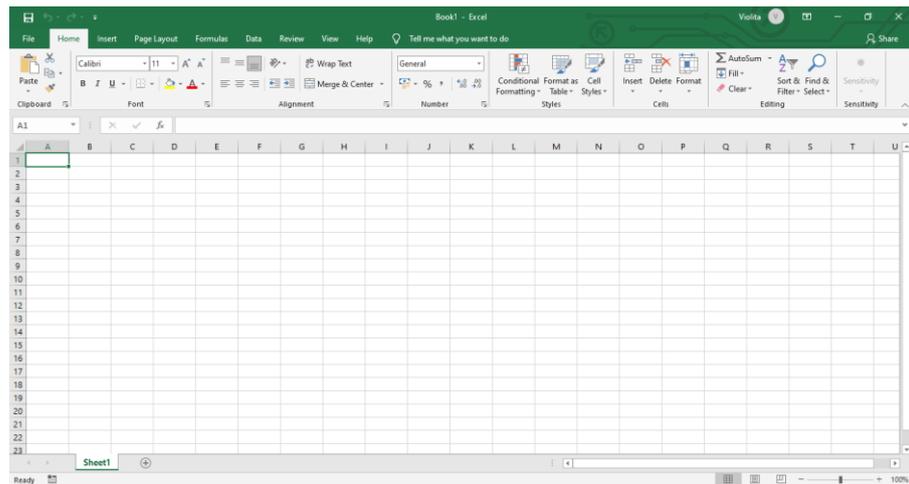
Sumber: ED SAK EMKM (2016)

6. Pengertian *Microsoft Excel*

Umumnya, *microsoft excel* banyak digunakan pada kalangan masyarakat luas sehingga *microsoft excel* sangat familiar di kalangan masyarakat luas karena cara penggunaannya yang tergolong sederhana. Menurut Andayani dan Setyawardani (2021:85) *microsoft excel* adalah salah satu program aplikasi *spreadsheet* canggih yang paling populer dan paling banyak digunakan untuk membantu menghitung, menganalisis, dan memproyeksikan data, serta dapat bekerja dengan sistem jaringan data.

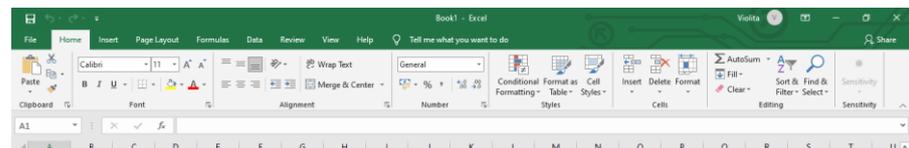
Gambar 2.13

Microsoft Excel



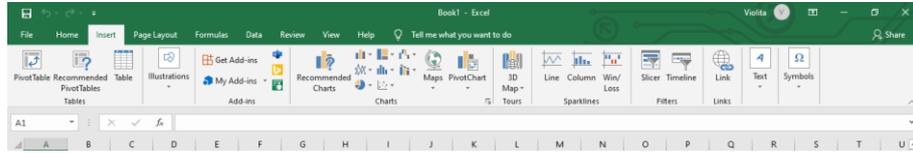
Gambar 2.14

Menu Home



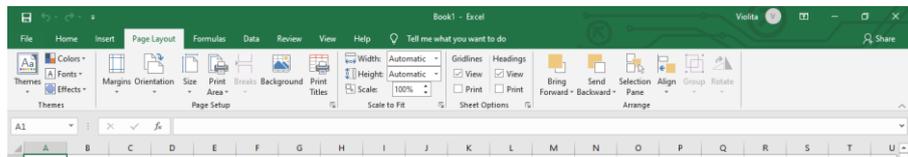
Gambar 2.15

Menu Insert



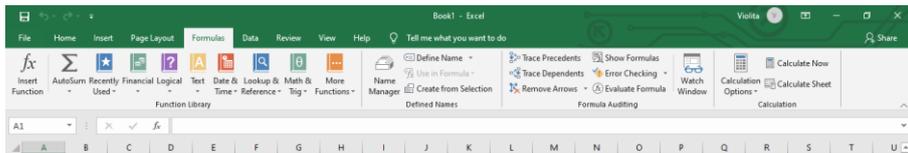
Gambar 2.16

Menu Page Layout



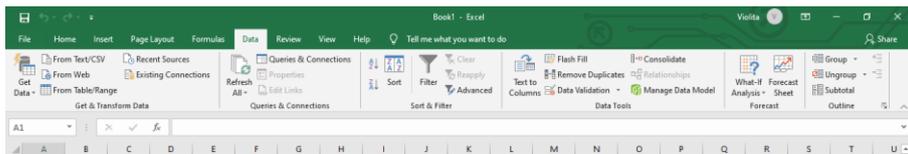
Gambar 2.17

Menu Formulas



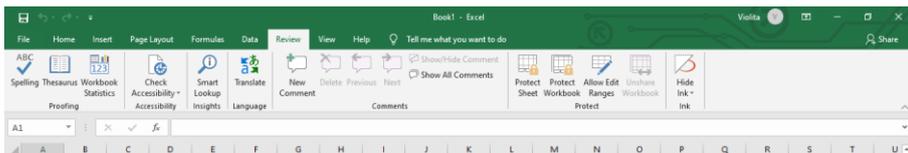
Gambar 2.18

Menu Data



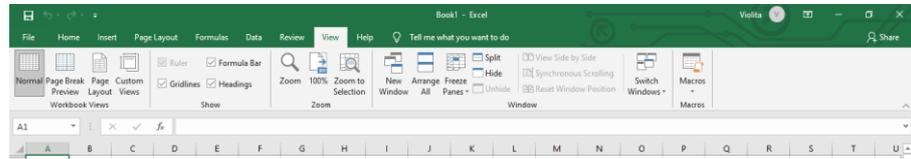
Gambar 2.19

Menu Review



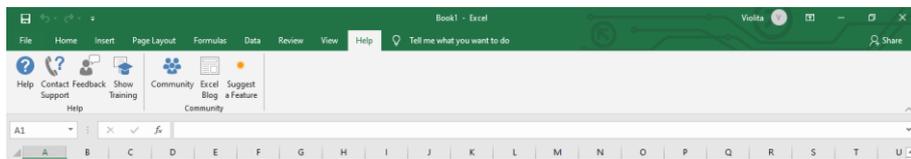
Gambar 2.20

Menu View



Gambar 2.21

Menu Help



B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dibuat berdasarkan acuan dan keterkaitan teori dari peneliti-peneliti terdahulu. Berikut adalah beberapa penelitian yang sebelumnya yang dijadikan dasar penelitian ini yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu yang terangkum dan diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4

Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti/Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Wahyu Lestari, Fransiska/2022	Implementasi SAK EMKM dalam Penyajian Laporan Keuangan pada UMKM Bidang Industri Pangan	Kualitatif deskriptif	Penyajian laporan keuangan pada UMKM Bidang Industri Pangan Kelurahan Hadimulyo Timur belum menerapkan SAK EMKM karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai penyusunan dan

				penyajian laporan keuangan.
2.	Sry Wulandari L, Reski/2022	Tinjauan Implementasi SAK EMKM Terhadap Penyajian Laporan Keuangan UMKM Di Kab. Gowa	Kualitatif	Dinas Koperasi belum mengambil peran mensosialisasikan SAK EMKM pada UMKM di Kab. Gowa, pihak yang membutuhkan laporan keuangan yaitu pemilik usaha serta investor dan kreditur.
3.	Pura, Yonanto/2018	Pemetaan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan EMKM pada UMKM di Kota Tangerang Selatan	Kualitatif studi deskriptif dan studi <i>fenomology</i>	Masih minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh para pelaku UMKM di Tangerang terhadap SAK EMKM sehingga perlu diadakan sosialisasi terkait penerapan SAK EMKM.
4.	Afianti, Puspita Putri/2017	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan SAK ETAP pada UMKM di Kabupaten Bogor	Kualitatif dengan metode <i>purposive sampling</i>	Data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa umur usaha serta persepsi yang dimiliki oleh setiap pelaku UMKM tidak berpengaruh terhadap penerapan SAK ETAP di Kabupaten Bogor
5.	Khaedar Sahib, Muh./2015	Analisis Penerapan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK	Kualitatif deskriptif	Sistem pencatatan keuangan yang dilakukan secara manual dan masih sangat sederhana, faktor yang menyebabkan gagalnya SAK ETAP pada Usaha Embung Jaya karena

		ETAP) pada sektor UMKM (Studi Kasus pada Usaha Embung Jaya)		kurangnya pemahaman, kedisiplinan dan SDM serta karena kurangnya pengawasan dari <i>stakeholder</i> yang berkepentingan atas laporan keuangan.
6.	Hetika, Nurul Mahmudah/2018	Penerapan Standar Akuntansi EMKM dalam Menyusun Laporan Keuangan, di Tegal Jawa Tengah	Kualitatif pendekatan studi kasus	Berdasarkan fenomena awal yang terjadi di lapangan, dimana para pelaku UMKM tidak menerapkan SAK EMKM karena kurangnya pemahaman terhadap penyusunan laporan keuangan, sehingga peneliti memberikan gambaran terkait persamaan akuntansi sederhana pelaporan keuangan EMKM, dan para pelaku UMKM merasa terbantu dengan inisiatif yang dilakukan peneliti.

Sumber: Hasil Olahan Data (2023)

Berdasarkan tabel hasil-hasil penelitian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa persamaan dan perbedaan penelitian ini terhadap penelitian-penelitian terdahulu yaitu akan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.5

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti/Tahun	Persamaan Penelitian	Perbedaan	
		Dulu	Sekarang
Wahyu Lestari, Fransiska/2022	Standar Akuntansi yang digunakan menggunakan SAK	Objek penelitian ini adalah industri	Objek penelitian ini adalah UMKM Semangkuk Bakso

	EMKM	pangan	di Bandar Lampung
Sry Wulandari L, Reski/2022	Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode kualitatif	Tinjauan implementasi SAK EMKM terhadap penyajian laporan keuangan	Menganalisis penerapan SAK EMKM terhadap penyusunan laporan keuangan
Pura, Yonanto/2018	Standar akuntansi yang digunakan menggunakan SAK EMKM	Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan studi deskriptif dan studi <i>fenomenology</i>	Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif
Afianti, Puspita Putri/2017	Penyusunan laporan keuangan pada UMKM	Standar akuntansi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan SAK ETAP serta metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif dengan <i>purposive sampling</i>	Standar akuntansi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan SAK EMKM serta metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif deskriptif
Khaedar Sahib, Muh./2015	Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif	Standar akuntansi yang digunakan menggunakan SAK ETAP	Standar akuntansi yang digunakan menggunakan SAK EMKM
Hetika, Nurul Mahmudah/2018	Standar akuntansi yang digunakan menggunakan SAK EMKM	Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif

Sumber: Hasil Olahan Data (2023)

C. Kerangka Teori

Proses terakhir dari siklus akuntansi adalah laporan keuangan, karena laporan keuangan merupakan ringkasan atas pencatatan seluruh transaksi yang terjadi dalam satu periode. Kerangka teori merupakan acuan yang digunakan peneliti untuk melaksanakan proses penelitian secara tertata yaitu mengenai bagaimana untuk menghubungkan teori dengan fenomena serta berbagai masalah yang terjadi. Masalah yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini adalah penerapan SAK EMKM pada UMKM Semangkuk Bakso Pahoman. Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka teori yang digunakan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.22

Kerangka Teori

